



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SETYA BUDI HARSANA  
NIK : 3310110607660004  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
Unit Kerja : RSJD SURAKARTA  
Sub Unit Kerja : BAGIAN KEUANGAN  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI  
Jenis Laporan : Periodik - 2018  
Tanggal Kirim : 8 Februari 2019

**Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:**

Lengkap  
 Tidak Lengkap



*\*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : RSJD SURAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : BAGIAN KEUANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SETYA BUDI HARSANA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI
3. NHK : 210103

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 500.000.000

1. Tanah Seluas 1.675 m2 di KLATEN, WARISAN Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 138.000.000

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 21.000.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 16.335.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 675.335.000

**III. HUTANG** Rp. 120.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 555.335.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2019**.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.